



BAPPEDA



LAPORAN

EFEKTIFITAS DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH

**KERJASAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
TAHUN 2019**

ISSN :

TIM PENYUSUN

**EFEKTIFITAS DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT DI KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH**

1. Ir. Gusmeri, M.T.
2. Dr. Zaki Fuad, M.Ag.
3. Nila Herawati, SE, M.Si.
4. Parmakope, SE, MM.
5. Dr. Muhammad Adnan, SE. M.Si.
6. Faidian Faisal, S.STP
7. Asmaul Husna

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Kami berharap laporan survei **”Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”** dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan perencanaan program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Kota Banda Aceh.

Penyusun menyadari bahwa masih terdapat kekurangan maupun mungkin kesalahan dalam penyusunan laporan ini, sehingga penyusunan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang dari seluruh pembaca.

Banda Aceh, 12 November 2019

Tim Penyusun

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa serta apa saja hambatan dalam merealisasikan dana desa di Kota Banda Aceh pada umumnya dan Kecamatan Syiah Kuala khususnya, Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik Pengumpulan Data Metode Observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik Analisis yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*) dan Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*). Berdasarkan indikator dan prinsip pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan bahwa dana desa belum cukup efektif dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam merealisasikan dana desa yaitu dimensi waktu dan mindset masyarakat serta kualitas Sumber Daya Manusia. Rekomendasi untuk pemerintah desa, agar bisa mengaktifkan kembali BUMDes atau BUMG untuk menyiapkan desa yang mandiri dan ntuk pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong masyarakat desa untuk memberdayakan ekonominya,

Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1..Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Konsep Efektivitas.....	9
2.1.1 Indikator Efektivitas	9
2.1.2 Faktor yang mempengaruhi efektivitas	12
2.2 Dana Desa.....	14
2.2.1 Mekanisme penyaluran Dana Desa	16
2.2.2 Prioritas Penggunaan Dana Desa	17
2.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	20
2.3.1 Prinsip-prinsip Pemberdayaan	23
2.3.2 Tujuan Pemberdayaan	24
2.3.3 Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	27
2.4 Penelitian Terdahulu	29
2.5 Kerangka Berfikir	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Rancangan Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	33

3.4	Objek Penelitian.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data	35
3.6	Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....		38
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1.	Pemukiman, Gampong dan Dusun di Kecamatan Syiah Kuala	39
4.1.2.	Jumlah Penduduk menurut Gampong di Kecamatan Syiah Kuala	41
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	42
4.2.1.	Jumlah Dana Desa perdesa di Kecamatan Syiah Kuala.....	42
4.2.2.	Karakteristik Informan Penelitian.....	45
4.2.3.	Kondisi Mata Pencarian Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala.....	47
4.2.4.	Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala.....	50
4.2.4.1	Indikator Efektivitas.....	51
4.2.4.2	Indikator Prinsip Pemberdayaan.....	59
4.2.5.	Hambatan-hambatan dalam merealisasikan Dana Desa	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....		73
LAMPIRAN		75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pengalokasian Dana Desa di Kota Banda Aceh.....	4
Tabel 1.2	Pengalokasian Dana Desa di Kecamatan Syiah Kuala	6
Tabel 2.1	Penelitian Terkait	30
Tabel 4.1	Pemukiman,Gampong dan Dusun di Kecamatan Syiah Kuala.....	39
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk menurut Gampong Tahun 2018	41
Tabel 4.3	Jumlah Dana Desa (DD) di Kecamatan Syiah Kuala tahun 2015.....	42
Tabel 4.4	Jumlah Dana Desa (DD) di Kecamatan Syiah Kuala tahun 2016.....	43
Tabel 4.5	Jumlah Dana Desa (DD) di Kecamatan Syiah Kuala tahun 2017.....	43
Tabel 4.6	Jumlah Dana Desa (DD) di Kecamatan Syiah Kuala tahun 2018.....	44
Tabel 4.7	Jumlah Dana Desa (DD) di Kecamatan Syiah Kuala tahun 2019.....	44
Tabel 4.8	Jumlah Informan Setiap Gampong (Desa).....	45
Tabel 4.9	Jumlah informan menurut umur	46
Tabel 4.10	Jumlah Informan menurut jenis Kelamin	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	27
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BUMDes.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara.....	75
Dokumentasi	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia diawali dari pembangunan ditingkat yang paling bawah yaitu Pembangunan Desa. Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan cara memberdayakan serta mengembangkan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Untuk membangun partisipatif masyarakat, potensi ekonomi saat ini menjadi incaran setiap daerah. Dukungan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi di masyarakat desa sudah mulai diwujudkan dalam realisasinya, hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan desentralisasi birokrasi yang mengalami perubahan yang cukup baik agar kebijakan-kebijakan yang dibuat cepat tersalurkan dan membantu mengurangi masalah-masalah yang ada. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul kewenangan dalam konteks lokal berskala desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan umum Pasal 1 Ayat 12 Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi serta pertanian masyarakat desa. Sejak tahun 2015 telah diberlakukan program dana desa, fokus pencapaian program dana desa adalah bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat, artinya salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah melalui program dana desa. Pemberdayaan masyarakat yang merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*) dalam hal ini apapun pengertian yang diberikan terhadapnya selalu merujuk pada upaya perbaikan mutu hidup manusia, baik secara fisik maupun mental, ekonomi dan sosial budayanya (Totok: 2019). Program pemberdayaan masyarakat memiliki maksud dan tujuan yang bermanfaat untuk perbaikan berbagai aspek kehidupan masyarakat, menurut Aprillia,dkk (2012) tujuan pemberdayaan adalah untuk memperbaiki pendidikan yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas yang baik, perbaikan tindakan (*better action*) dilanjutkan perbaikan kelembagaan dan usaha sehingga mampu memperbaiki pendapatan masyarakat serta lingkungan, dengan perbaikan-perbaikan kehidupan dan masyarakat itu sendiri akan jauh lebih baik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas desa sebagai instrumen relatif baru dikeluarkan oleh pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang membahas Peraturan Pelaksanaan

UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang menjelaskan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Pembangunan desa yang berkelanjutan akan menjadikan sebuah desa berkembang dalam segala aspek terutama dalam membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Pemerintah yang selama ini menjalankan sebuah program besar yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan program desa yang menjadi senjata dalam pembangunan desa dan pemberdayaan desa di setiap daerah. Pada dasarnya dana desa tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur semata, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan supaya pembangunan dapat merata. Pemberdayaan dapat berupa penerapan modal usaha produktif meliputi usaha masyarakat setempat.

Pengelolaan dana desa tentunya ada ukuran dalam mengukur efektif atau tidaknya program dana desa. Pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi mutu suatu daerah sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi indikasi penting untuk mendorong kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam hal pencapaian program-program prioritas, dalam hal ini salah satunya adalah

pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat. Terlepas dari pemerintah dan masyarakat desa sendiri, hambatan dalam merealisasikan program dana desa bisa saja datang dari pihak luar dan keadaan sosial masyarakat. Hambatan-hambatan ini seharusnya dapat dicarikan solusi yang tepat, agar dapat ditindaklanjuti untuk mendorong pengelolaan dana desa secara lebih maksimal.

Kota Banda Aceh merupakan Ibukota Provinsi Aceh yang responsif terhadap tuntutan desa. Menjadi ibukota Provinsi Aceh yang merupakan Provinsi yang berada pada urutan ketiga sebagai penerima kucuran Dana Desa terbesar di Indonesia setelah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mendorong pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mencapai keefektifitasan dalam pengelolaan Dana Desa. Kota Banda Aceh menjadi salah satu daerah yang menerima kucuran dana desa yang relatif besar dimana secara kasat mata masyarakat melihat bahwa Banda Aceh cukup maju baik dari infrastruktur dan juga kondisi masyarakatnya, kota yang dijuluki sebagai kota pelajar ini memiliki daya tarik tersendiri untuk dilihat baik dari jumlah dana desa yang dikucurkan sampai kepada tingkat efektivitasnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun jumlah dana desa yang diterima oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pengalokasian Dana Desa di Kota Banda Aceh

Tahun	Pengalokasian Dana Desa
2015	3.713.337.699
2016	55.864.119.000
2017	70.932.443.000
2018	64.464.666.000
2019	74.192.333.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel 1.1 pengalokasian dana desa di atas dapat kita lihat bahwa jumlah dana desa yang dikucurkan untuk Kota Banda Aceh meningkat dari Tahun 2015 sebesar Rp.3.713.337.699 dan pada tahun 2016 sebesar Rp.55.864.119.000 dan tahun 2017 sebesar Rp.70.932.443.000, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan anggaran yang dikucurkan di bawah tahun sebelumnya 2017, yaitu sebesar 64.464.666.000. Kemudian pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2019 (sedang berjalan) mengalami peningkatan anggaran yaitu dana yang dikucurkan sebesar Rp.74.192.333.000

Keefektivitasan dana desa dalam hal ini fokus kepada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat penting untuk ditingkatkan dikarenakan dana desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan kucuran dana yang begitu besar apabila mampu dikelola dengan baik dan jujur maka tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan produktifitas masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan desa, masyarakat yang inovatif, kemiskinan

berkurang dan akan bermuara pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kota Banda Aceh adalah Kecamatan Syiah Kuala yang merupakan Kecamatan tua sebagian wilayahnya telah berkembang selanjutnya wilayahnya juga mengapit dua Perguruan Tinggi besar di Aceh dan perguruan tinggi lainnya, berada di lingkungan akademisi tentunya menjadi nilai lebih bagi pemerintah di wilayah Kecamatan Syiah Kuala dalam mengelola dana desa serta pengetahuan untuk memajukan desa khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Syiah Kuala menjadi salah satu penerima dana desa yang besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Berikut total pengalokasian dana desa untuk Kecamatan Syiah Kuala :

Tabel 1.2
Pengalokasian Dana Desa di Kecamatan Syiah Kuala

TAHUN	PENGALOKASIAN DANA DESA
2015	2,825,246,573
2016	6,243,140,066
2017	7,924,588,495
2018	7,163,097,077
2019	8,473,404,698

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel 1.2 pengalokasian dana desa di atas dapat kita lihat bahwa jumlah dana desa yang dikucurkan untuk Kecamatan Syiah Kuala secara otomatis sama dengan tabel 1.1 yaitu pengalokasian dana desa untuk Kota Banda Aceh meningkat dari Tahun 2015 sebesar Rp.2,825,246,573 dan pada tahun 2016 sebesar Rp.6,243,140,066 dan tahun 2017 sebesar Rp.7,924,588,495 namun pada tahun 2018

mengalami penurunan anggaran yang dikucurkan dibawah tahun sebelumnya 2017, yaitu sebesar Rp.7,163,097,077. Kemudian pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan anggaran yaitu dana yang dikucurkan sebesar Rp .8,473,404,698

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2018) bahwa nilai efektivitas dana desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar 119% yang berarti sangat efektif dan nilai efisiensi diperoleh sebesar 304% yang berarti tidak efisien. Menurut Yeni, dkk (2018) bahwasanya Penggunaan keuangan desa untuk pembangunan sangat efektif, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat cukup efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Boedijono, dkk (2019) menyatakan bahwa efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan sebesar 98% dalam kategori efektif dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 85% dalam kategori cukup efektif. Menurut Arif Maulidin (2017) efektivitas sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka dilakukan sebuah penelitian dengan judul **“Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Banda Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa di Kecamatan Syiah Kuala?

2. Apa saja hambatan dalam merealisasikan dana desa di Kecamatan Syiah Kuala?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam merealisasikan dana desa di Kecamatan Syiah Kuala.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Banda Aceh umumnya dan Kecamatan Syiah Kuala khususnya,
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan rujukan, referensi dan bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effective* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Agung Kurniawan (205:109) mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas menurut pengertian tersebut mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2.1.1 Indikator Efektivitas

Untuk melihat keefektivitasan suatu kebijakan atau program maka ada indikator-indikator tertentu yang digunakan untuk mengukur tingkat keefektivitasan. Makmur (2010) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

1. Ketetapan penentuan waktu, waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketetapan perhitungan biaya, hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran, hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai suatu efektifitas.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah, merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan, tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran, dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau

organisasi dalam mencapai tujuan.

Sugiyono dan Budiani (2007: 53) menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditentukan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan itu sendiri. (Makmur: 2010)
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi yang mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan secara peserta khususnya. Menurut Wilcox dalam Mardikonto (2013: 86). Memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan sebagaimana pengetahuan bagi yang menerima informasi tersebut.
3. Tujuan Program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya, pencapaian tujuan harus dipandang sebagai proses, oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahapan

baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang konkrit.

4. Pemantauan Program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya. Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya,

2.1.2 Faktor yang mempengaruhi efektivitas

Efektivitas sangat bergantung pada faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas tersebut, baik faktor yang bisa mendukung serta menghambat proses peningkatan keefektifitasan dalam suatu kebijakan dan program. Hasibuan dalam Samsuddin Dkk (2014,2) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program antara lain:

1. Kualitas Aparatur, kualitas sumber daya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.
2. Kopetensi Administrator, Kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu.

3. Sarana prasarana merupakan penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk bagian yang terpenting untuk terselenggaranya aktivitas.
4. Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas dalam sebuah lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah factor internal dan eksternal (Tangkilisan: 2002) :

- a. Faktor internal yaitu keseluruhan factor yang berasal dari dalam atau berkaitan dengan sekelompok orang yang melakukan aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama merupakan unsur terpenting dalam suatu kelompok atau lembaga. Hubungan kerjasama yang baik maka keberhasilan pencapaian tujuannya akan lebih cepat (Tangkilisan, 2002).

Selanjutnya, Makmur (2011:264) berpendapat bahwa hubungan kerja dalam kelembagaan pemerintah sangat dibutuhkan suatu bentuk pemikiran dan tindakan secara nyata agar bangunan hubungan kerja itu dapat memberikan manfaat baik bagi anggota kelembagaan itu sendiri maupun kelembagaan pemerintah. Faktor-faktor Internal tersebut antara lain:

1. Departemenisasi, kegiatan menyusun satuan-satuan dalam suatu lembaga.

2. Fleksibilitas, keadaan dimana struktur organisasi mudah diubah untuk disesuaikan dengan tuntunan dan kebutuhan yang ada.
 3. Rentangan Kontrol
 4. Berkelangsungan, yaitu kondisi untuk memberikan dukungan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki agar aktivitas dapat berjalan terus.
 5. Kepemimpinan (*Leader*), proses pemerintah yang mempengaruhi agar kegiatan yang saling terkait dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 6. Keseimbangan, ditempatkan pada struktur dan perannya masing-masing.
- b. Faktor Eksternal mencakup suatu jaringan hubungan-hubungan pertukaran dengan sejumlah lembaga dan melibatkan diri dengan tujuan untuk memperoleh dukungan, mengatasi hambatan, melakukan sumber daya, menata lingkungan yang kondusif dan proses transformasi nilai maupun inovasi dan norma social yang ada.

2.2 Dana Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan

masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Buku Saku Dana Desa: 2018).

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui peraturan menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia, yang menjadi salah satu program Nawacita (sembilan program) dalam mewujudkan upaya pemerintah untuk membangun Indonesia melalui program DD. DD adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk

selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot :

1. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
2. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis
3. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Adapun tujuan dari Dana Desa sebagaimana disampaikan oleh pemerintah yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa

4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.2.1 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Proses penyaluran atau distribusi dana desa memiliki tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh pemerintah yang menjadi dasar (peraturan) yang harus dipenuhi, adapun tahapan-tahapan penyaluran dana desa adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran Dari RKUN ke RKUD
 - a. Tahap 1 sebesar 60% paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli, dengan persyaratan:
 - 1) Perda APBD
 - 2) Perkada mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian DD tiap desa.
 - 3) Laporan konsolidaasi realisasi penyalurann dan realisasi penyerapan DD tahun sebelumnya
 - b. Tahap 2 sebesar 40% paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan:
 - 1) Laporan DD telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%
 - 2) Laporan DD tahap 1 sudah diserap oleh desa rata-rata paling kurang 75%
 - 3) Rata-rata capaian output paling kurang 50%.
2. Penyaluran dari RKUD ke RKD
 - a. Tahap 1 disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD dengan

persyaratan:

- 1) Perdes APB Desa
 - 2) Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya
- b. Tahap 2 disalurkan 7 hari setelah diterima di RKUD dengan

persyaratan:

- 1) Laporan penyerapan DD tahap 1 menunjukkan rata-rata paling kurang 75%
- 2) Capaian output rata-rata paling kurang 50%.

2.2.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah memiliki prioritas pencapaian dalam penggunaannya, dua prioritas yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, berikut uraian prioritas dana desa:

1. Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Pembangunan Desa
 - a. Sarana Prasarana Desa
 - 1) Lingkungan pemukiman, seperti drainase dan tempat pembuangan sampah.
 - 2) Transportasi, antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa dan tambatan perahu
 - 3) Energi, antara lain pembangkit listrik tenaga diesel.
 - 4) Informasi dan Komunikasi, antara lain jaringan internet, telepon umum dan website desa

- b. Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar
 - 1) Kesehatan masyarakat, antara lain air bersih, posyandu dan polindes
 - 2) Pendidikan dan kebudayaan, seperti perpustakaan desa.
 - c. Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa, usaha ekonomi pertanian atau lainnya seperti embung desa, irigasi desa, penggilingan padi, lumbung desa dan pondok wisata.
 - d. Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan hidup
 - 1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
 - 2) Penanganan bencana alam
 - 3) Penanganan bencana luar biasa lainnya
 - 4) Pelestarian Lingkungan hidup.
 - e. Sarana Prasarana lainnya
2. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
 - b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa
 - d. Pengembangan sistem informasi desa
 - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang:
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan

- 3) Pemberdayaan perempuan dan anak
 - 4) Pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas
- f. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa
 - g. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya
 - h. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
 - i. Pengembangan kerjasama antardesa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
 - j. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanggulangan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya
 - k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

2.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*" yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Rappaport mengartikan *empowerment* sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan

masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan- kegiatan swadaya.

Menurut Bashith (2017) pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah adanya perubahan masyarakat menjadi lebih baik, sehingga mereka dapat terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Maka akan adanya peningkatan dalam kemampuan serta peningkatan dari segi kemandirian ekonomi. Dalam hal ini pemberdayaan ekonomi masyarakat memerlukan adanya peran aktif dan kreatif dari masyarakat.

Menurut Payne dalam Maharani (2012), pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk membantu manusia memperoleh daya, kekuatan serta kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan manusia tersebut.

Terdapat 5 konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat (1999) seperti yang dikutip oleh Mardi Yatmo Hutomo (2000:6), secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas

untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:
 - a. pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal)
 - b. memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*
 - c. pelayanan pendidikan dan kesehatan
 - d. penguatan industri kecil

- e. mendorong munculnya wirausaha baru
- f. pemerataan spasial.

Menurut Priyono dan Pranarka dalam (Totok: 2012) proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekankan pada proses pemberian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. *Kedua*, proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Berkenaan dengan pemberdayaan, ada tiga power yang bisa menguatkan kapasitas masyarakat. Adapun power tersebut adalah

- a. *Power to* (kekuatan untuk) merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak, rangkaian ide dari kemampuan.
- b. *Power with* (kekuatan dengan) merupakan tindakan bersama, kemampuan untuk bertindak bersama. Dasarnya saling mendukung, solidaritas dan kerjasama. *Power with* dapat membantu membangun jembatan dengan menarik perbedaan jarak untuk mengubah atau mengurangi konflik sosial dan mempertimbangkan keadilan relasi.
- c. *Power within* (kekuatan di dalam) merupakan harga diri dan martabat

individu atau bersama. Power within ini merupakan kekuatan untuk membayangkan dan membuat harapan. Sehingga di dalamnya berupa niat, kemauan, kesabaran, semangat, dan kesadaran.

2.3.1 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Dalam memenuhi program pemberdayaan ada kriteria atau ukuran yang harus dipenuhi oleh setiap pelaksana disebut juga sebagai prinsip pemberdayaan. Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan (Najiyati, dkk. 2005) yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

2. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi.

Prinsip “*mulailah dari apa yang mereka punya*”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2.3.2 Tujuan Pemberdayaan

Program pemberdayaan masyarakat memiliki maksud dan tujuan yang

bermanfaat untuk perbaikan-perbaikan segala aspek kehidupan yang positif, adapun tujuan pemberdayaan menurut Aprillia, dkk. (2012) meliputi beragam upaya sebagai berikut:

1. Perbaikan Pendidikan (*better education*)

Pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.

2. Perbaikan Aksesibilitas (*better accessibility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan dan penyedia produk dan peralatan.

3. Perbaikan tindakan (*better action*)

Dengan berbekal pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan tindakan atau kegiatan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

5. Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan serta aksesibilitas, kegiatan dan juga kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan.

6. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan bisa memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

7. Perbaikan Lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali terjadi karena pendapatan yang terbatas.

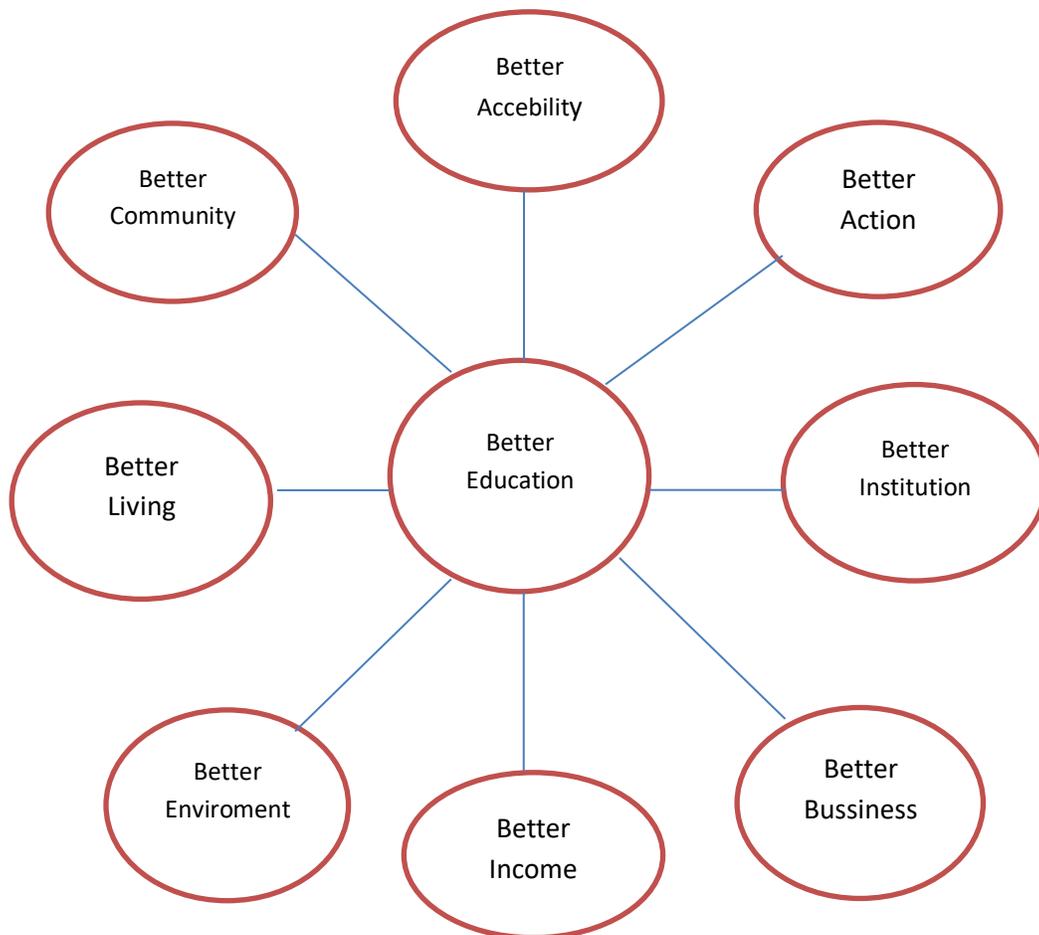
8. Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

9. Perbaikan Masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Dari tujuan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat pada dasarnya terbentuk dari perbaikan pendidikan dan akan memberikan dampak positif terhadap perbaikan lainnya seperti perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan dan masyarakat. Jadi perbaikan pendidikan sangat mempengaruhi hal lainnya



Gambar 2.1
Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

2.3.3 Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kegiatan atau program pemberdayaan ada tahapan-tahapan tertentu yang harus ditanamkan dalam jiwa masyarakat baik individu ataupun kelompok. Menurut Wilson (Sumaryadi, 2004) kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari:

1. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati atau partisipasi masyarakat.
2. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan atau kenikmatan dan hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.
3. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
4. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya.
5. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan , yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.
6. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
7. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

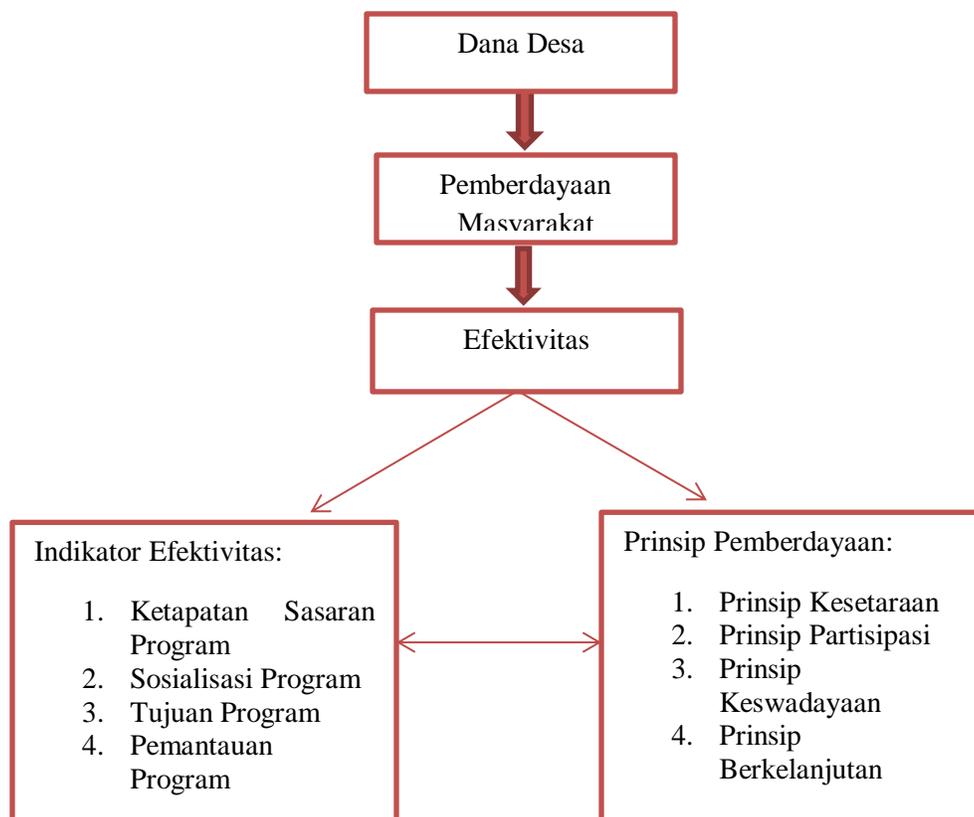
NO	Peneliti dan Tahun	Tujuan	Jenis Penelitian	Kesimpulan
1.	Nurul, dkkS (2018)	Untuk mendeskripsikan dan mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana gampong pada BUMG Capa paloh.	Penelitian dengan Metode Deskriptif kualitatif	Diperoleh nilai efektivitas 119,2% artinya sangat efektif, dan nilai efiseinsinya sebesar 304,21% artinya tidak efisien dikarenakan belum banyak hewan ternak yang dijual dan belum adanya pendampingan dari pendamping desa.
2.	Muhammad, dkk (2017)	Untuk menganalisis efektifitas dari alokasi dana desa menuju pembangunan masyarakat khususnya pada aspek ekonomi berbasis partisipasi masyarakat.	Metode kualitatif deskriptif	Penggunaan alokasi dana desa sangat efektif untuk mengembangkan potensi ekonomi.
3.	Boedijono, dkk (2019)	Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa serta efektifitas guna pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di	Metode Kualitatif deskriptif	Efektifitas penggunaan dana desa dalam pembangunan sebesar 98% dalam katagori efektif dan untuk pemberdaayaan masyarakat sebesar 85% dalam kategori cukup efektif.

		Kabupaten Bondowoso.		
4.	Faizatil Kharimah, dkk (2018)	Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Deket Kulon.	Metode kualitatif pendekatan deskriptif	Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat sudah baik tetapi perlu peningkatan dalam melibatkan masyarakat pada tahap perencanaan, kegiatan ,pertanggung jawaban serta transparansi.
5.	Arif Maulidin (2017)	Untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Taanjong Kabupaten Pidie.	Metode Kualitatif deskriptif	Efektivitas sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.4 Kerangka Pemikiran

Ada dua bidang prioritas dalam pengalokasian dana desa yaitu pembangunan dan pemberdayaan. Sejauh ini pembangunan di setiap desa sudah membaik terutama infrastrukturnya seperti jalan, jembatan, polindes dan bangunan lainnya. Maka dari itu pembangunan fisik tidak cukup jika tidak beriringan dengan pembangunan masyarakat ataupun pemberdayaan masyarakat, karena menurut Kementerian Desa pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus pencapaian dalam program dana desa yang sudah berlangsung sejak tahun 2015. Maka perlu dilakukan pengkajian

untuk melihat efektivitas dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat, adapun yang menjadi indicator dalam mengukur efektivitas dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dengan menggunakan indicator efektivitas yang dikemukakan oleh Sugiyono dan Budiani (2007) yaitu dengan melihat ketetapan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Setelah diukur dengan indicator tersebut maka dilihat lagi dengan menggunakan prinsip pemberdayaan ekonomi yang dikemukakan oleh Najati, dkk. (2005) yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian (keswadayaan) dan berkelanjutan.



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif empiris dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:15) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci. Berdasarkan Rumusan Masalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory* atau *survey explanatory*. Metode penelitian survei explanasi (*explanatory survey*) adalah suatu metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel (Sugiyono: 2014).

3.2 Lokasi Penelitian

.Lokasi penelitian ini di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang terdiri dari 3 pemukiman, 10 desa dan 41 dusun. Kecamatan Syiah Kuala adalah salah satu kecamatan tua di Kota Banda Aceh, dengan Ibukota Kecamatan berada di Gampong Lamgugob. Penelitian ini mengambil studi kasus di Kecamatan Syiah Kuala salah satunya karena sebagian wilayahnya telah berkembang selanjutnya

wilayahnya juga mengapit dua Perguruan Tinggi besar di Aceh dan perguruan tinggi lainnya,

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli, dalam hal ini data diperoleh dari wawancara dengan beberapa aparatur desa dan masyarakat desa di setiap Desa yang ada di Kecamatan Syiah Kuala.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa dinas atau instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Aparatur Desa dan Masyarakat Desa di setiap Desa yang ada di Kecamatan Syiah Kuala sebagai informan penelitian dan yang menjadi objek penelitiannya adalah dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana penentuan informan dipilih dengan pertimbangan khusus dari peneliti, dengan mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisis dalam penelitian ini. Menurut Iskandar (2010), *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan berdasarkan penilaian subjektif peneliti, karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai kaitan dengan apa yang ingin diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

- a. **Metode Observasi**, yaitu mengamati, mencari data dari beberapa fakta mengenai hal yang ada hubungannya dengan permasalahan. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mengetahui secara umum mengenai keadaan ekonomi masyarakat dan juga mengenai sejauh mana efektivitas dana desa di Kota Banda Aceh
- b. **Metode Wawancara**, wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara semi-struktur. Menurut Sugiyono (2014) jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
- c. **Metode Dokumentasi**, menurut Sugiyono (2014) dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif guna untuk memperkuat penelitian, dokumen yang berupa sumber-sumber, foto, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

- a. **Reduksi data (*data reduction*)**, Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, untuk dicari tema dan polanya sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini, reduksi data yang dilakukan dengan memfokuskan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada subjek penelitian yaitu aparatur desa dan masyarakat desa.

- b. Penyajian data (*data display*),** penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam memahami dan menguasai data yang telah dikumpulkan sehingga bisa merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan hasil analisis data dilapangan.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*).** langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang akan dicapai.

Indikator yang digunakan untuk melihat efektivitas pada penelitian ini adalah yang dipaparkan oleh Sugiyono dan Budiani (2007: 53) yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam

melakukan sosialisasi program sehingga informasi yang mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan secara peserta khususnya.

3. Tujuan Program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan Program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Setelah menggunakan indikator efektivitas, maka juga dilihat dengan prinsip pemberdayaan menurut Najati, dkk (2005). Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan, yaitu kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Partisipasi, program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat masyarakat.
3. Keswadayaan atau kemandirian, yaitu menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain.
4. Berkelanjutan, program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Dati II Banda Aceh, terjadi perluasan wilayah Kota Banda Aceh menjadi 61,36 km² dari sebelumnya hanya seluas 11,08 km². Kecamatan Syiah Kuala adalah salah satu Kecamatan tua di Kota Banda Aceh, yang sebelumnya terdiri dari 19 Gampong/Desa yang bersal dari Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan Ibukota Kecamatan berada di Gampong Lamgugob. Namun Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No.8 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata telah menyebabkan perubahan wilayah, sebagian wilayah Kecamatan Syiah Kuala berkurang membentuk Kecamatan Ulee Kareng sebagai pecahan dari Kecamatan Induk.

Kecamatan Syiah Kuala terdiri dari 3 Kemukiman, 10 Gampong dan 41 Dusun. Sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 175 Tahun 2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembentukan Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Gampong Peurada menjadi gampong termuda di Kecamatan Syiah Kuala dan merupakan satu-satunya gampong yang lahir setelah Kecamatan Syiah Kuala terbentuk. Terdapat beberapa akademi dan perguruan tinggi di Kecamatan Syiah Kuala. Dua Perguruan Tinggi diantaranya adalah yang yang terbesar di

Provinsi Aceh, yakni Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar Raniry). Keduanya terletak di Kopelma Darussalam.

Kecamatan Syiah Kuala sendiri sesuai Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh tahun 2018 memiliki luas wilayah sebesar 14,244 km² dan letak geografisnya 95,35579⁰ BT dan 05,556816⁰ LU.

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Ulee Kareng
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Besar
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Alam

4.1.1 Pemukiman, Gampong dan Dusun di Kecamatan Syiah Kuala

Kecamatan Syiah Kuala memiliki 3 Pemukiman, 10 Gampong dan 41 Dusun, hal tersebut ditegaskan oleh informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka 2018), berikut nama pemukiman, desa dan dusun di Kecamatan Syiah Kuala:

Tabel 4.1
Pemukiman, Gampong dan Dusun di Kecamatan Syiah Kuala

Mukim	Gampong	Dusun
1. Kayee Adang	1. Ie Masen Kayee Adang	1. Ujung Blang 2. Ujung Tanjong 3. Ujung Krueng 4. Kebun Raja
	2. Pineung	1. T Bentara Pineung 2. T Muda Rayeuk 3. T Chik Dipineung 4. T Teungoh 5. T Hasyem
	3. Lamgugob	1. Tunggai

	4. Peurada	<ol style="list-style-type: none"> 2. Lamnyong 3. Kayee Adang 1. Bahagia 2. Setia 3. Sentosa
2. Tgk Chik Di Lamnyong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kopelma Darussalam 2. Rukoh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sederhana 2. Utara 3. Barat 4. Selatan 5. Timur 1. Lam Ara 2. Meunasah Baro 3. Meunasah Tuha 4. Silang 5. Lamnyong
3. Tgk.Syeh Abdur Rauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeulingke 2. Tibang 3. Deah Raya 4. Alue Naga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unung Krueng 2. Jeulingke Indah 3. Rawa Bakti 4. Lampoh Raya 5. Raja Wali 6. Rawa Sakti 1. Tgk. Meurah 2. Tgk.Meulinjee 3. Tgk. Meulagu 1. Syeh Abdurrauf 2. Banta Mudu 3. Nek Bayan 4. Syik Musa 1. Beunot Meujanggot 2. Musafir 3. Kutaram 4. Po Diamat

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2018

4.1.2 Jumlah Penduduk menurut Gampong di Kecamatan Syiah Kuala

Pada tahun 2018 sesuai data yang diperoleh dari BPS Kota Banda Aceh, jumlah penduduk di Kecamatan Syiah Kuala yaitu sebanyak 37,192 jiwa.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk menurut Gampong Tahun 2018

NO	Gampong	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Ie masen Kayee Adang	4415
2.	Pineung	4389
3.	Lamgugob	4403
4.	Kopelma Darussalam	4728
5.	Rukoh	5183
6.	Jeulingke	6567
7.	Tibang	1515
8.	Deah Raya	1023
9.	Alue Naga	1627
10.	Peurada	3342

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2018

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling sedikit adalah di desa Deah Raya dan jumlah penduduk tertinggi yaitu di desa Jeulingke.

4.2 Hasil Peneliitian dan Pembahasan

4.2.1 Jumlah Dana Desa (DD) per Desa di Kecamatan Syiah Kuala

Dana desa pertama kali diberlakukan paada tahun 2015 sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada desa sebagai bentuk desentralisasi birokrasi di Indonesia. Kecamatan Syiah Kuala telah menerima dana desa sejak tahun 2015 hingga sekarang tahun 2019, sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh berikut jumlah dana desa yang diterima setiap desa di Kecamatan Syiah Kuala dari 2015 sampai dengan tahun 2019 :

Tabel 4.3
Jumlah Dana Desa (DD) di Kecamatan Syiah Kuala tahun 2015

NO	NAMA GAMPONG	DD TAHUN 2015
1	Lamgugop	Rp 278.025.107
2	Peurada	Rp 273.062.801
3	Jeulingke	Rp 289.848.773
4	Kopelma Darussalam	Rp 277.171.401
5	Rukoh	Rp 280.367.339
6	Alue Naga	Rp 289.330.624
7	Deyah Raya	Rp 283.197.554
8	Ie Masen Kayee Adang	Rp 288.545.864
9	Tibang	Rp 283.510.444
10	Pineung	Rp 282.186.666
	TOTAL	Rp 2.825.246.573

Tabel 4.4
Jumlah Dana Desa (DD) di Kecamatan Syiah Kuala tahun 2016

NO	NAMA GAMPONG	DD TAHUN 2016
1	Lamgugop	Rp 612.935.116
2	Peurada	Rp 622.278.851
3	Jeulingke	Rp 631.017.555
4	Kopelma Darussalam	Rp 626.425.635
5	Rukoh	Rp 643.704.177
6	Alue Naga	Rp 621.293.820
7	Deyah Raya	Rp 620.453.342
8	Ie Masen Kayee Adang	Rp 627.560.226
9	Tibang	Rp 616.775.964
10	Pineung	Rp 620.695.380
	TOTAL	Rp 6.243.140.066

Tabel 4.5
Jumlah Dana Desa (DD) di Kecamatan Syiah Kuala tahun 2017

NO	NAMA GAMPONG	DD TAHUN 2017
1	Lamgugop	Rp 778.492.327
2	Peurada	Rp 789.960.886
3	Jeulingke	Rp 800.686.827
4	Kopelma Darussalam	Rp 795.050.676
5	Rukoh	Rp 816.258.468
6	Alue Naga	Rp 788.751.853
7	Deyah Raya	Rp 787.720.246
8	Ie Masen Kayee Adang	Rp 796.443.280
9	Tibang	Rp 783.206.608
10	Pineung	Rp 788.017.324
	TOTAL	Rp 7.924.588.495

Tabel 4.6
Jumlah Dana Desa (DD) di Kecamatan Syiah Kuala tahun 2018

NO	NAMA GAMPONG	DD TAHUN 2018
1	Lamgugop	Rp 681.575.823
2	Peurada	Rp 694.619.972
3	Jeulingke	Rp 729.317.736
4	Kopelma Darussalam	Rp 721.875.248
5	Rukoh	Rp 750.770.819
6	Alue Naga	Rp 723.635.603
7	Deyah Raya	Rp 727.613.088
8	Ie Masen Kayee Adang	Rp 716.443.813
9	Tibang	Rp 720.633.239
10	Pineung	Rp 696.611.736
	TOTAL	Rp 7.163.097.077

Tabel 4.7
Jumlah Dana Desa (DD) di Kecamatan Syiah Kuala tahun 2019

NO	NAMA GAMPONG	DD TAHUN 2019
1	Lamgugop	Rp 798.670.390
2	Peurada	Rp 787.194.214
3	Jeulingke	Rp 849.551.318
4	Kopelma Darussalam	Rp 819.454.896
5	Rukoh	Rp 835.412.228
6	Alue Naga	Rp 984.910.447
7	Deyah Raya	Rp 853.162.070
8	Ie Masen Kayee Adang	Rp 837.116.885
9	Tibang	Rp 912.749.271
10	Pineung	Rp 795.182.979
	TOTAL	Rp 8.473.404.698

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, secara umum di Kecamatan Syiah Kuala Anggaran Dana Desa yang dikucurkan meningkat dari tahun 2015 Rp2.825.246.573 ke tahun

2016 sebesar Rp6.243.140.066 dan tahun 2017 sebesar Rp7.924.588.495, namun pada tahun 2018 dana yang dikucurkan lebih sedikit dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp7.163.097.077, kemudian pada tahun 2019 meningkat yaitu sebesar Rp8.473.404.698, otomatis di setiap Desa yang ada di Kecamatan Syiah Kuala juga mengalami hal yang sama.

4.2.2 Karakteristik Informan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para informan, penentuan informan memakai teknik purposif (*purposive sampling*) yang didasarkan pada kemampuan informan menggambarkan secara jelas mengenai dana desa, pengelolaan serta program-program yang telah dicapai.

Tabel 4.8
Jumlah Informan Setiap Gampong (Desa)

NO	Nama Gampong (Desa)	Jumlah Informan
1.	Ie Masen Kayee Adang	6
2.	Lamgugop	5
3.	Peurada	6
4.	Tibang	6
5.	Jeulingke	5
6.	Deah Raya	4
7.	Alue Naga	4

8.	Kopelma Darussalam	5
9.	Rukoh	5
10.	Pineung	5
	TOTAL	51

Jadi jumlah Informan keseluruhan adalah 51 orang dan setiap informan terdiri dari masing-masing Gampong(Desa) di Kecamatan Syiah Kuala. 51 orang tersebut terdiri dari aparatur desa dan masyarakat desa pada setiap desa dimana dalam penentuan informan pertama jumlahnya adalah 1 informan dari aparatur desa setiap desa dan 3 masyarakat desa, namun saat penelitian berlangsung ada beberapa desa yang informasinya tidak terpenuhi maka ditambah jumlah informan agar memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun karakteristik informan adalah informan berdasarkan umur dan berdasarkan jenis kelamin, berikut informasi jumlah informan sesuai kriteria:

- a. Informan berdasarkan umur

Tabel 4.9
Jumlah informan menurut umur

Umur	Jumlah
20-40	29
40-65	22

Jadi informan dalam penelitian ini menurut umurnya adalah 29 orang yang masih berumur 20-40 tahun dan untuk umur 40-65 jumlahnya 22 tahun.

b. Informan menurut jenis kelamin

Tabel 4.10
Jumlah Informan menurut jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Pria	32
Wanita	19

Menurut jenis kelamin informan dalam penelitian ini masing-masing pria 32 orang dan perempuan 19 orang.

4.2.3 Kondisi Mata Pencaharian Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala

Dari hasil wawancara dengan para informan dari setiap Gampong(Desa), secara umum perekonomian penduduk di setiap Desa Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan mata pencahariannya telah mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (primer) masyarakat. Namun jika dilihat secara spesifik setiap Desa memiliki beragam mata pencaharian penduduk yang terdiri dari PNS, wiraswasta,pekerja swasta, buruh, petani, dan nelayan.

Seperti di Desa Ie Masen Kayee Adang, para aparatur desa mengatakan bahwa hampir sebagian penduduk di desa tersebut berstatus PNS yaitu dengan persentase 45% dan selebihnya 55% mencakup buruh, swasta, pedagang, mahasiswa dan juga pengangguran, sedangkan untuk pengangguran sendiri mencapai 15% (dilihat berdasarkan angkatan kerja di Ie Masen Kayee Adang). Dan kondisi perekonomian di Ie Masen Kayee Adang tergolong baik.

Pada Desa lainnya seperti Peurada, juga kondisi perekonomian di desa tersebut tergolong cukup baik, sama halnya dengan Ie Masen Kayee Adang sebagian penduduk di Peurada berstatus PNS yaitu sebesar 55% selebihnya merupakan pekerja swasta, pedagang, buruh, mahasiswa dan pengangguran.

Di Desa Jeulingke yang merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak (menurut data BPS tahun 2018) di Kecamatan Syiah Kuala, memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik tidak berbeda dari desa-desa yang telah disebutkan sebelumnya, di Desa Jeulingke memiliki sebagian penduduk berstatus PNS dan penduduk lainnya pekerja di sector swasta, pengusaha dan juga buruh serta mahasiswa.

Menurut informan yang diwawancarai di Desa Lamgugob baik aparatur desa maupun masyarakat, di Desa Lamgugob memiliki perekonomian yang baik dimana masyarakatnya dominan PNS (45%) dan juga pedagang, selanjutnya juga ada penduduk yang bekerja sebagai buruh dan tingkat pengangguran di Desa Lamgugob sendiri menurut angkatan kerja yang disampaikan oleh aparatur desa persentasenya ialah 10%. Dan di Desa ini masyarakat yang menerima raskin sebanyak 50 orang, meliputi janda yang menanggung anaknya dan juga penduduk biasa. Para Aparatur Desa sendiri menyampaikan kepada peneliti, bahwasanya raskin men menjadi salah satu hal yang cukup efektif dalam mencapai kebutuhan masyarakat khususnya yang pendapatannya tidak dapat memenuhi jumlah tanggungannya, misalnya ada

dalam satu rumah memiliki 5 orang anak dengan pendapatan perbulan hanya sebesar 1,5 juta rupiah.

Dilanjutkan dengan Desa Pineung yang jaraknya cukup dekat dari ibukota kecamatan Syiah Kuala yaitu Lamgugop, sama dengan beberapa desa diatas bahwa di Desa Pineung mayoritas penduduk berstatus PNS dan selain PNS juga ada pedagang dan lainnya. Desa ini tergolong cukup baik kondisi ekonomi masyarakatnya. Setiap informan yang telah diwawancarai meliputi aparatur desa dan juga masyarakatnya, seperti di Kopelma Darussalam salah satu informannya yang merupakan sebagai aparatur desa mengatakan bahwa kondisi ekonomi di desa tersebut tergolong sangat baik karena hampir semua penduduk berstatus PNS yaitu sebanyak 80%. , sementara pengangguran hanya 1-2%.

Berbeda dari 6 Desa yang telah disebutkan salah satu Informan pada Desa Rukoh yang juga berstatus sebagai aparatur desa mengatakan bahwa kondisi ekonomi di Desa Rukoh masih belum cukup baik, karena masih banyak masyarakat miskin dan pengangguran. Namun sebagian masyarakatnya juga memiliki pekerjaan baik PNS, buruh bangunan,petani, pekerja swasta dan juga wiraswasta. Desa selanjutnya yaitu Tibang, Alue Naga dan Deyah Raya, menurut informan baik aparatur desa maupun masyarakat umum mengatakan bahwa mata pencaharian warga didominasi oleh Nelayan dan buruh, namun juga terdapat beberapa warga yang berstatus PNS, pekerja swasta dan pedagang.

Seperti di Desa Deyah Raya jumlah PNS hanya 11 orang, nelayan 86 orang, selebihnya buruh dan untuk pengangguran hanya 1,90%.

Secara umum sesuai hasil wawancara di desa-desa maka kondisi ekonomi masyarakat tergolong cukup baik di enam dari sepuluh desa yaitu Ie Masen Kayee Adang, Pineung, Lamgugob,Jeulingke,Perada dan Kopelma. Sedangkan empat desa Rukoh, Deyah Raya, Tibang dan Alue Naga masih terdapat banyak masyarakat miskin karena dominan nelayan kecil bukan nelayan besar, yang setiap harinya pendapatan yang diperoleh hanya berkisar 30-50 ribu rupiah.

4.2.4 Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah prioritas program dana desa setelah bidang pembangunan. Setelah hampir lima tahun program dana desa berjalan, infrastruktur di pedesaan sudah sangat memadai, sehingga ke depan arah kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan dana desa difokuskan pada dua hal yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan Ekonomi Desa.

Secara kasat mata, di Kota Banda Aceh khususnya di Kecamatan Syiah Kuala infrastrukturnya sudah sangat memadai, sehingga dapat dikatakan bahwa infrastruktur yang memadai secara otomatis akan mampu memberikan dampak positif terhadap berjalannya program kegiatan lainnya yang

dilaksanakan. Masyarakat di setiap desa yang ada di Kecamatan Syiah Kuala menyambut baik perubahan yang telah tercapai melalui dana desa terutama infrastrukturnya yang memadai dan semua yang direalisasikan sebagai program kegiatan yang anggarannya melalui dana desa.

4.2.4.1 Indikator Efektivitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan 51 informan yang meliputi aparatur desa dan masyarakat di setiap desa yang ada di Kecamatan Syiah Kuala, dapat kita lihat tingkat keefektivitasan dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa berdasarkan indikator yang telah disebutkan sebelumnya, indikator yang dipakai yaitu indikator yang ditegaskan oleh Sugiyono dan Budiani (2007: 53), dimana ada empat indikator yang dipakai untuk melihat keefektivitasan dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, yaitu:

1. Ketetapan sasaran program

Melihat sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya Dalam hal ini, fasilitator merupakan para aparatur desa yang telah membuat program-program untuk direalisasikan, namun program-program yang telah dibuat juga merupakan bagian dari usulan-usulan masyarakat saat musyawarah desa. Khusus di bidang pemberdayaan masyarakat, yang menjadi program untuk direalisasikan hampir semuanya merupakan usulan dari masyarakat baik laki-laki

maupun perempuan.

Seperti di Desa Pineung program-program yang telah berjalan seperti pelatihan menjahit jilbab bagi ibu-ibu, pelatihan membuat kue, merias wajah, membuat accessories Aceh dan juga pelatihan komputer bagi pemuda yang menganggur, menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat. Sama halnya dengan desa-desa lainnya, di desa lain juga diadakan kegiatan yang sama seperti membuat kue ada di setiap desa seperti Ie masen Kayee Adang, lamgugob, Perada, Jeulingke, Tibang, Deyah Raya, Rukoh, Alue Naga dan juga Kopelma Darussalam.

Di ibukota kecamatan Syiah Kuala yaitu desa Lamgugob, terdapat satu produk unggulan yang telah dikenal oleh publik dan sudah banyak peminatnya yaitu tenun Aceh. Awalnya pada tahun 2017 tenun tersebut mulai diaktifkan kembali oleh Dekranasda Kota Banda Aceh, namun pada tahun 2019 untuk peralatan atau bahan bakunya dianggarkan dana desa untuk membelinya. Ini menjadi salah satu mata pencaharian ibu-ibu yang berstatus Ibu Rumah Tangga. Dimana mereka akan mendapatkan upah dari hasil menenun, setelah tenunnya dibeli oleh orang-orang, dan ini menjadi salah satu program yang tepat sarannya dalam menentukan pesertanya.

Saat ini pemberdayaan masyarakat memang sedang digagaskan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kreatifitas dan inovasi masyarakat, di desa Jeulingke bahkan sudah ada

masyarakat yang menjual kue kering yang merupakan hasil dari kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh aparatur desa yang memakai sumber dana dari Dana Desa.

Dari semua kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di setiap desa, tentunya para fasilitator dalam hal ini aparatur desa sangat transparan dalam merekrut pesertanya. Semua pihak yang ingin mengikuti kegiatan akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi terutama bagi yang mempunyai waktu luang dan mempunyai keterampilan di setiap kegiatan yang diselenggarakan.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat di setiap desa yang juga sebagai informan, semua dari mereka dilibatkan untuk berpartisipasi, namun ada yang tidak mengikuti atas dasar ketidakmauan karena berbagai faktor, salah satunya adalah tidak bisa meninggalkan aktivitas pribadi, contohnya seperti AM yang merupakan warga Tibang mengetahui adanya program atau kegiatan yang akan dilaksanakan tetapi tidak mengikutinya karena lebih memilih untuk mengurus anak yang masih balita di rumah. Jadi untuk ketepatan sasaran program selama ini yang dianggarkan melalui dana desa cukup efektif karena perekrutan pesertanya jelas dan transparan serta tepat sasaran.

Masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan masyarakat yang memiliki waktu luang, sedangkan yang tidak mengikuti memiliki kesibukan lainnya seperti masyarakat yang berstatus sebagai

pedagang, PNS dan buruh, jadi ketika ada kegiatan yang dilaksanakan di desa yang tidak mengikuti itu karena batasan waktu, dari jumlah informan sebanyak 51 orang baik dari aparatur desa dan juga masyarakat, telah menegaskan bahwa fakta yang terjadi adalah seperti yang tersebut di atas.

2. **Sosialisasi Program**

Untuk melihat Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi yang mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan peserta khususnya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, di setiap desa yang ada di Kecamatan Syiah Kuala, dalam melaksanakan program kegiatan akan selalu diberitahukan kepada masyarakat umum sehingga dapat direkap peserta yang mengikuti. Artinya, semua pihak mengetahui bahwa akan diadakan suatu program kegiatan karena jauh hari telah diberitahukan baik melalui pengeras suara yang ada di setiap sara atau masjid, maupun salah satu dari aparatur desa yang datang langsung ke rumah masyarakat. Di beberapa desa juga memakai sistem informasi melalui media perpesanan WhatsApp yaitu membuat group khusus baik yang terdiri dari per dusun dan juga perdesa secara umum, jadi ketika ada kegiatan akan diberitahukan sekilas di Group WhatsApp, seperti di desa Kopelma dan juga Jeulingke. Namun ada juga terdapat group WhatsApp di beberapa desa lainnya seperti

Rukoh yang terbagi dari setiap dusun serta khusus aparaturnya, maka penyampaian informasi dimulai dari group khusus aparaturnya baru di *forward* ke group selanjutnya (perdusun). Sama halnya dengan Rukoh di Gampong Pineung, Alue Naga, Lamgugob dan Perada memiliki group WhatsApp khusus aparaturnya desa dan juga perdusun dengan tujuan agar informasi tepat sasaran dan merata.

Hal ini juga diakui oleh informan dari masyarakat seperti Z dan S yang merupakan masyarakat Pineung dan Jeulingke. Setelah penyampaian informasi yang merupakan bagian dari sosialisasi sebelum diadakan kegiatan, maka juga harus ada sosialisasi untuk meningkatkan apa yang telah dicapai dalam kegiatan yang dilaksanakan, di setiap desa selalu ada sosialisasi lanjutan setelah kegiatan berlangsung seperti membuat diskusi kecil oleh aparaturnya desa bersama masyarakat dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan dan juga memberi masukan serta arahan kepada masyarakat.

Masyarakat desa yang telah diwawancarai sebagian memang tidak menggunakan *smart phone* yang bisa mengupgrade aplikasi perpesanan WhatsApp, namun mereka tidak mengeluh karena informasi juga sampai kepada mereka dengan cepat baik aparaturnya desa langsung yang mendatangi rumah warga, maupun kepala lorong dan juga pemberitahuan di surau.

Setiap aparaturnya desa juga mengakui bahwa media perpesanan

yang canggih saat ini memudahkan kerja mereka menjadi lebih mudah dan lancar karena mampu meningkatkan efisiensi waktu. Maka dalam hal ini, sosialisasi program sangat baik dan cukup efektif di semua desa.

3. Tujuan Program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Semua program kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan-tujuan yang positif untuk masyarakat pada umumnya dan peserta khususnya. Seperti yang dikatakan oleh setiap aparatur desa di Kecamatan Syiah Kuala bahwasanya setiap kegiatan yang dibuat merupakan usulan dari masyarakat desa dan juga melihat karakteristik serta keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu. Namun dalam hal ini, yang menjadi satu perhatian adalah di sebagian desa yang ada di Kecamatan Syiah Kuala sebagian masyarakat cenderung konsumtif sebagai pelaku ekonomi, di setiap kegiatan baik pelatihan ataupun sosialisasi para peserta sebagian mengharapkan *feedback* dalam bentuk uang, padahal tujuan dari program kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk mengasah keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu.

Seperti kata informan dari aparatur desa yang telah diwawancarai, bahwasanya setiap masyarakat yang mengikuti kegiatan sebagian ada yang mengharapkan insentif dari kegiatan tersebut dan masyarakat seperti ini terdapat di semua desa di Kecamatan Syiah Kuala.

Di beberapa desa seperti Rukoh, Tibang dan Deyah Raya ada yang bekerja sebagai buruh, maka ketika diadakan kegiatan di desa mereka lebih memilih bekerja daripada mengikuti pelatihan yang dilaksanakan, padahal jika ditelaah tujuan dari program ini sangat baik dan cukup efektif dalam membangun ekonomi masyarakat ke depan. Masyarakat bisa memiliki pengetahuan yang lebih dalam melaksanakan kegiatan ekonominya sehari-hari, mengubah pola hidupnya yang awalnya tidak produktif bisa menjadi produktif dengan pengetahuan baru yang dimiliki dan keterampilan yang diasah.

Pada indikator yang ketiga, maka dapat dilihat bahwa kegiatan yang dilaksanakan memakai anggaran Dana Desa masih jauh dari kata efektif, karena tujuan program dengan pencapaian masih terlalu jauh, dalam hal ini untuk membangkitkan ekonomi rakyat masih sangat jauh dan masyarakat masih sangat bergantung pada pelatihan yang disediakan insentif. Tetapi para aparatur desa yang menjadi informan menegaskan bahwa hal-hal seperti ini akan selalu dicarikan solusi bersama dan melalui mengupgrade kegiatan untuk setiap tahunnya,

4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Setelah program yang dilaksanakan berjalan, maka seharusnya ada pemantauan dari pihak aparatur desa ataupun fasilitator agar bisa melihat bagaimana perkembangan masyarakat setelah mengikuti

kegiatan-kegiatan yang telah diadakan. Adapun yang bertanggung jawab untuk pemantauan ialah Tuha Peut yang merupakan lembaga permusyawaratan gampong yang memegang fungsi pengawasan di desa sama dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota legislatif, di Provinsi Aceh disebut Tuha Peut yang lebih dikenal ditingkat Nasional sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

Di Kecamatan Syiah Kuala pemantauan telah dilakukan oleh semua desa, baik dari proses pembangunan dan juga bidang pemberdayaan masyarakat serta segala aspek yang menjadi prioritas dana desa. Namun perkembangan masyarakat tidak terlalu positif dari rencana yang telah ditetapkan, padahal kegiatan yang dilaksanakan merupakan ide ataupun usulan dari masyarakat itu sendiri.

Peran yang dimiliki oleh Tuha Peut Gampong ini tentunya menjadi indikator yang sangat penting dalam melihat sejauh mana efektivitas dana desa selama ini dalam membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa sehingga menjadi mandiri dalam perekonomian dan aspek kehidupan lainnya. Di Kecamatan Syiah Kuala yang sangat tinggi pengawasannya adalah di desa Peurada, Kopelma Darussalam, Ie Masen Kayee Adang, Lamgugob, Jeulingke dan Pineung. Selain itu desa lainnya seperti Rukoh, Deyah raya dan Alue naga masih belum efektif seperti desa yang telah disebutkan di atas.

Informan dari masyarakat di sebagian desa mengatakan

bahwasanya aparatur desa khususnya Tuha Peut sangat ramah dan memiliki aktualisasi perannya yang sangat baik. Namun yang menjadi salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah pengetahuan masyarakat desa dalam mengenal siapa saja yang menjabat sebagai aparatur desa khususnya Tuha Peut yang memegang peran penting dalam membangun desa yaitu fungsi pengawasan, karena seperti di beberapa desa yaitu Pineung, Lamgugob, Deyah Raya, Alue Naga, Peurada dan Rukoh ada informan dari masyarakat desa yang tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai Tuha Peut di desanya.

Berdasarkan 4 indikator efektivitas yang telah disebutkan, maka dapat dilihat bahwasanya di indikator yang ketiga masih belum efektif, salah satunya adalah karena sifat atau karakter masyarakat.

4.2.4.2 Indikator Prinsip Pemberdayaan

Dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap desa, baik itu pelatihan ataupun sosialisasi, khususnya seperti pelatihan menghasilkan produk-produk yang telah dipaparkan oleh semua aparatur desa dan juga masyarakat desa yang telah diwawancarai. Ada beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat yang dapat menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara

masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pada prinsip yang ini semua desa dan masyarakatnya memenuhi prinsip kesetaraan, dimana di desa-desa setiap masyarakat yang memiliki pengetahuan atau ide akan selalu diterima dengan baik usulannya maupun ide-idenya. Tanpa melihat atau membandingkan posisi baik sebagai aparatur ataupun masyarakat biasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan setiap informan dari masyarakat desa yang ada di seluruh desa di Kecamatan Syiah Kuala, menyatakan bahwa kesetaraan yang paling dominan ada di Desa Tibang, Pineung, Jeulingke dan Lamgugob, karena setiap kegiatan yang dimasukkan dalam rancangan kegiatan desa tidak membandingkan kegiatan perempuan dan laki-laki, setiap kegiatan tetap merangkul semua elemen masyarakat tanpa memandang jenis kelamin, maka dalam hal ini kesetaraan yang dimiliki di desa tersebut di atas sangat baik dan tidak ada perbandingan untuk setiap elemen masyarakat.

Pada kegiatan yang dilaksanakan, juga tidak membandingkan yang mampu dengan yang tidak mampu, karena fokus pencapaian adalah untuk pemberdayaan maka dimulai dari lapisan masyarakat yang kurang mampu. Namun pada desa lainnya seperti Kopelma, Ie Masen Kayee Adang, Deyah Raya ketika kegiatan yang dilaksanakan dengan kehadiran sedikit masyarakat khususnya pada kegiatan perempuan, itu disebabkan oleh

keterbatasan waktu dan profesi perempuan yang ada di masyarakat tersebut seperti PNS, pedagang dan juga buruh. Tetapi, di semua desa prinsip kesetaraan telah tercapai karena melihat kegiatan yang dilaksanakan dari mulai perumusan hingga realisasi sangat baik responnya dari semua elemen masyarakat, baik yang mampu ataupun tidak, perempuan ataupun laki-laki dan juga aparat desa serta masyarakat desa.

2. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, menyatakan bahwa di setiap desa memiliki karakter masyarakat yang berbeda-beda, mata pencaharian yang berbeda (profesi) serta kemampuan masyarakat yang berbeda-beda. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan di desa masih sangat jauh dari persentase yang diharapkan, dalam hal ini penyebabnya adalah profesi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Di Kecamatan Syiah Kuala, tingkat partisipasi masyarakat yang paling tinggi di bidang pemberdayaan masyarakat adalah di Desa lamgugob dimana setiap ada kegiatan baik pelatihan ataupun sosialisasi kesehatan dan lainnya, sangat

ramai pesertanya khususnya di kegiatan perempuan.

Desa dengan tingkat partisipasi masyarakat terendah yaitu di desa Kopelma Darussalam, hal ini disebabkan oleh profesi yang masyarakatnya dominan PNS baik guru, dosen, birokrat dan instansi lainnya. Sedangkan desa lainnya Rukoh, Perada, Alue Naga, Deyah Raya, Jeulingke, Pineung, Tibang dan Ie Masen Kayee Adang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang memadai atau sesuai target dari yang diharapkan.

Pada prinsip yang ini, tidak semua desa memenuhinya karena di setiap desa selain tingkat partisipasi masyarakat juga dilihat bagaimana setiap desa tidak semuanya memiliki pendamping yang mampu atau memiliki komitmen di bidang pemberdayaan, maka untuk itu pada prinsip yang ini harus lebih diimprovisasi agar tercapainya kemandirian masyarakat yang sesuai dengan tujuan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, terutama dalam mendorong masyarakat untuk menjadi bagian penting dalam pembangunan desa terutama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui dana desa.

3. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Pada prinsip keswadayaan atau kemandirian, masyarakat masih belum

sepenuhnya mandiri, karena setelah kegiatan pelatihan ada yang sebagian mandiri untuk selalu mengasah diri dan sebagiannya lagi tidak memberdayakan pengetahuan yang telah dimiliki.

Seperti yang disampaikan oleh informan dari aparat desa di Desa Pineung, setelah kegiatan pelatihan masyarakat tidak mengupgrade kembali di rumah ilmu yang telah didapatkan, secara sederhana ketika mengikuti pelatihan masyarakat hanya untuk menghilangkan rasa jenuh di rumah karena setiap kegiatan untuk perempuan para partisipannya adalah ibu rumah tangga. Di Kecamatan Syiah Kuala, tingkat kemandian masyarakat yang terlihat adalah di Desa Lamgugop, dimana tenun yang awalnya dilatih oleh pihak dekranasda kemudian paada tahun 2019 mulai dianggarkan dari dana desa untuk membeli bahan baku sampai saat ini masih sangat aktif dan membantu ibu rumah tangga khususnya janda yang harus menghidupi anak-anaknya. Namun, tingkat kemandirian masyarakat di kecamatan Syiah Kuala masih jauh dari target yang ditentukan, dimana di desa lainnya (selain Lamgugop) tidak ada produk unggulan yang merupakan hasil dari kegiatan yang diadakan di setiap desa, hal ini menegaskan bahwa setiap desa harus bisa mencari solusi untuk meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat dalam membangun unit usaha sendiri dalam menciptakan produk yang bisa dijual untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemampuan tanpa bergantung kepada orang lain dan juga dana yang diberikan oleh pemerintah.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Prinsip ini adalah penentu dari tingkat pemberdayaan yang telah dicapai, karena tanpa keberlanjutan maka kegiatan apa saja tidak disebut pemberdayaan. Kunci pemberdayaan adalah keberlanjutan, ketika masyarakat mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi, ketika itu berlanjut dan tidak vakum maka pemberdayaan telah ada.

Seperti halnya ketika ada kegiatan menjahit atau membuat kue khas Aceh, setelah kegiatan berlangsung masyarakat memilih untuk melanjutkan sampai menjualnya minimal dipesan dalam kapasitas kecil oleh orang lain dan bahkan diharapkan dapat mandiri untuk menciptakan bisnis kuliner dengan mengurus surat izin usaha sendiri, jika hal tersebut terjadi maka ekonomi masyarakat akan bangkit dan produktif, serta masyarakat sudah tidak bergantung kepada pendamping lagi.

Maka dari hasil wawancara dan analisa berdasarkan indikator efektivitas dan prinsip pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan bahwa dana desa belum cukup efektif dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Keberlanjutan program atau kegiatan yang telah diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengasah kreatifitas masyarakat sangat penting dan keberlanjutan menjadi salah satu prinsip terpenting dalam empat prinsip yang telah disebutkan diatas, karena tanpa keberlanjutan maka pemberdayaan itu tidak

efektif. Namun dana yang dianggarkan untuk pemberdayaan masyarakat tidak hanya dari dana desa, namun juga dari dana lainnya seperti Bagi Hasil Retribusi (BHR).

4.2.5 Hambatan-hambatan dalam merealisasikan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan para aparatur desa di semua desa Kecamatan Syiah Kuala, adapun hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah sebagai berikut:

1. Dimensi waktu

Waktu merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia, dalam merealisasikan dana desa tentunya waktu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya, salah satu contohnya ialah ketika kegiatan yang telah direncanakan atau dimasukkan ke dalam program yang akan direalisasikan, pencairan dana desa telat dari yang telah ditargetkan. Seperti yang diketahui bersama bahwasanya proses untuk mencairkan dana desa sangat ketat dan tersistem. Ketika tidak tepat waktu, maka kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi sulit untuk mencapai keefektivitasan dan efisiensi.

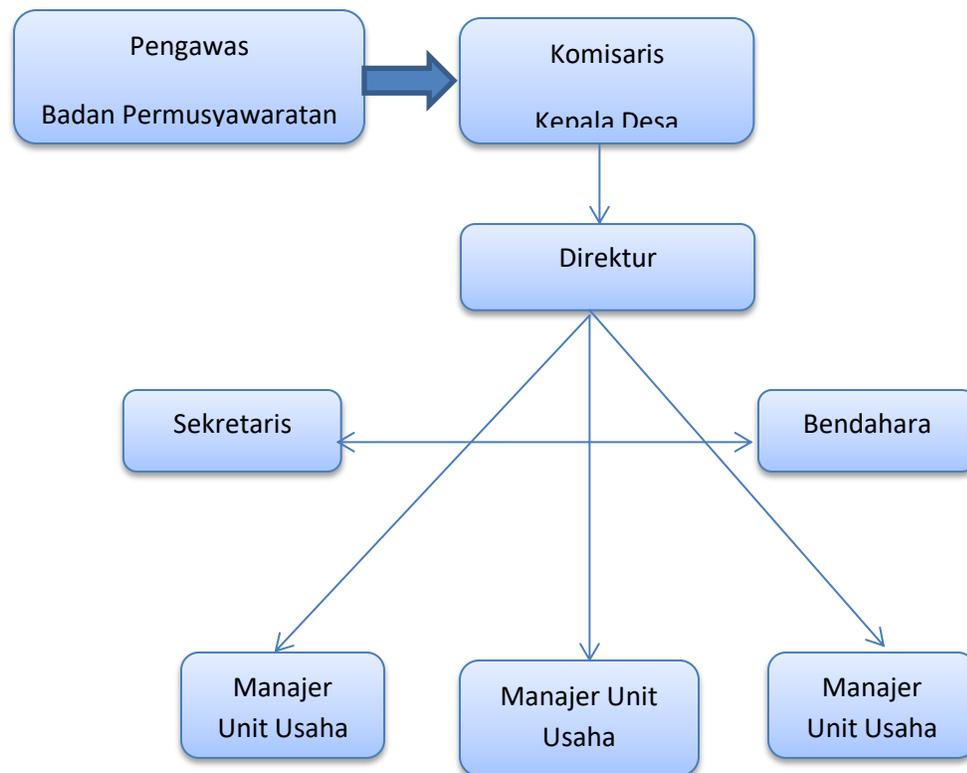
Seperti di Kopelma Darussalam, ketika telah ditentukan suatu kegiatan pada bulan maret namun harus diundur karena keterbatasan biaya atau biaya yang belum cair, hal ini disampaikan oleh informan di desa tersebut yang merupakan aparatur desa, namun informan juga mengatakan bahwa bukan hanya dari faktor dana tetapi juga keterbatasan waktu baik dari aparatur dan juga masyarakat desa. Hal yang sama juga ada di 9 desa lainnya, dimana

waktu menjadi salah satu hambatan dalam realisasi dana desa, namun hal ini terus dicarikan solusi bersama agar mampu mencapai target atau sasaran pembangunan desa ke depannya.

2. Mindset masyarakat dan kualitas SDM

Mindset menjadi salah satu tolak ukur kualitas Sumber Daya Manusia, yang dimiliki positif maka kualitasnya juga positif. Di setiap desa di Kecamatan Syiah Kuala, setiap desa pasti ada masyarakat yang memiliki pemikiran yang berlebihan terhadap dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat. Masyarakat cenderung melihat dana yang besar namun kurang mengetahui bahwa ada sistem keuangan yang mengaturnya. Bagi sebagian masyarakat dana desa dianggarkan untuk dipakai kemana saja tanpa porsi yang telah ditentukan atau prioritas yang telah ditetapkan dan ini menjadi tantangan sendiri bagi aparatur desa dalam mengelola dan juga merealisasikan dana desa, ditambah lagi jabatan keuchik merupakan jabatan politik yang setiap kebijakan mempunyai pro dan kontra.

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam merealisasikan dana desa terutama dalam bidang bidang pemberdayaan masyarakat. Contoh yang sangat besar adalah dalam pengaktifan BUMG atau disebut juga BUMDes. Tentunya dari struktur organisasi BUMDes setiap jabatan penting seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam meningkatkan kapasitas BUMG dan masyarakat



Gambar 4.1

Struktur Organisasi BUMDes

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintah dengan menempatkan posisi Desa sebagai kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Prioritas tersebut tercermin dalam Nawacita, khususnya Cita Ketiga. Prioritas posisi Desa tersebut membutuhkan komitmen pengawalan implementasi Undang Undang Desa secara sistematis konsisten dan berkelanjutan untuk mencapai Desa yang maju, kuat, mandiri

dan demokratis. Salah satu wujud komitmen tersebut ialah pengaturan tentang BUMDesa melalui Peraturan Kementerian Desa Nomor 4 Tahun 2015 sebagai amanat Undang Undang Desa. Sebagai amanat Undang Undang Desa BUMDes dapat dimaknai sebagai:

1. Salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
2. Salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
3. BUMDes sebagai salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Sesuai dengan urain diatas yang dikutip dari buku saku Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kita dapat menyimpulkan bahwa BUMDes dapat memberikan efek positif bagi setiap Desa yang fokus membentuk dan mengembangkan BUMDes. Namun fakta lapangan sangat berbeda dengan ekspektasi, berdasarkan hasil wawancara dengan para aparatur desa di 10 Desa yang ada di Kecamatan Syiah Kuala, hanya sedikit yang aktif, dikarenakan tidak ada kemampuan dari orang yang telah menjabat baik sebagai direksi, sekretaris dan juga bendahara serta belum ada unit usaha yang berbadan hukum.

Di Kecamatan Syiah Kuala, Desa Kopelma Darussalam sudah aktif dan dalam pembinaan oleh pemerintah Kota Baada Aceh, ada satu unit usaha yang berkembang yaitu Isi Ulang Air atau disebut RO. Sedangkan di desa lainnya, masih dalam tahap pengembangan dan pengaktifan kembali serta pembentukan struktur yang baru dengan melibatkan orang-orang kompeten yang diharapkan bisa memajukan desa menjadikan desa yang mandiri serta perekonomian masyarakat yang kuat melalui BUMDes.

Maka oleh karena itu, hambatan-hambatan tersebut dapat dicarikan solusi bersama untuk dapat meningkatkan pembangunan gampong khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk memiliki perekonomian yang kuat dan masyarakat yang mandiri dan produktif, ke depan aparatur desa harus mampu mendorong masyarakat dan membina agar terbentuknya unit usaha yang banyak agar BUMG mampu diaktifkan kembali.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator efektivitas dan prinsip pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan bahwa dana desa belum cukup efektif dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Namun dana yang dianggarkan untuk pemberdayaan masyarakat tidak hanya dari dana desa, namun juga dari dana lainnya seperti Bagi HASIL Retribusi (BHR).

Pada indikator efektivitas, tujuan program dengan pencapaian tidak sejalan, masyarakat yang telah mengikuti program kegiatan tidak memiliki niat untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengasah keterampilan, melainkan bergantung pada profit dalam bentuk materi. Dan jika dipelajari prinsip pemberdayaan, maka kegiatan yang telah dilaksanakan sumber dana melalui dana desa, maka tidak ada prinsip keberlanjutan yang dipenuhi sebagai kunci pemberdayaan. Berdasarkan hasil analisa, dana desa masih belum efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala.

2. Hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah sebagai berikut:

a. Dimensi waktu

Waktu merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia, dalam merealisasikan dana desa tentunya waktu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya, salah satu contohnya ialah ketika kegiatan yang telah direncanakan atau dimasukkan ke dalam program yang akan direalisasikan, pencairan dana desa telat dari yang telah ditargetkan. Seperti yang diketahui bersama bahwasanya proses untuk mencairkan dana desa sangat ketat dan tersistem. Ketika tidak tepat waktu, maka kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi sulit untuk mencapai keefektivitasan dan efisiensi.

b. Mindset masyarakat dan kualitas SDM

Mindset menjadi salah satu tolak ukur kualitas Sumber Daya Manusia, ketika mindset yang dimiliki positif maka kualitasnya juga positif. Di setiap desa di Kecamatan Syiah Kuala, setiap desa pasti ada masyarakat yang memiliki pemikiran yang berlebihan terhadap dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat. Masyarakat cenderung melihat dana yang besar namun kurang mengetahui bahwa ada sistem keuangan yang mengaturnya

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam merealisasikan dana desa terutama

dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Contoh yang sangat besar adalah dalam pengaktifan BUMG atau disebut juga BUMDes.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dicantumkan diatas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

- a. Untuk pemerintah desa, agar bisa mengaktifkan kembali BUMDes atau BUMG untuk menyiapkan desa yang mandiri dan maju serta menciptakan unit usaha yang bisa membantu perekonomian masyarakat desa.
- b. Untuk Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh agar mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong masyarakat desa untuk memberdayakan ekonominya, serta memfasilitasi pendamping desa agar menguasai bidang pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo. E & Muhammad. (2017). Efektivitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi berbasis partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo. 5(1) :128.
- Bashith, A. (2012). *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Boedijono, Wicaksono & Yeni Puspita . (2019). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB). 4(1) : 10-11.
- Fitri. N, Anwar & Fajri. (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi melalui Badan Usaha Milik Gampong di Gampong Capa Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah. 3(4):594-595.
- Griffin, W.R. (2018). *Manajemen jilid 1*. Jakarta : Erlangga
- Gunawan, S. (2017). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: 2017.
- Karimah. F, Saleh & Wanusmawati. (2017). Pengelolaan Alokasi dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*. 2(4) : 598.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Diakses oleh kemenkeu.go.id
- Kementerian ,Desa PDTT. (2017). *Bahan Bacaan Pelatihan Praturgas Pendamping Lokal Desa*. Jakarta Selatan, Kementerian Desa.
- Kementerian Desa PDTT. (2015). *Peraturan Kementerian Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian BUMDes*. Diakses oleh jogloabang.com pada 5 Desember 2017.
- Kurniawan. A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Maharani. A. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: BKKBN

- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardikanto,T & Soebianto. (2019). *Pemberdayaan masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Maulidin. A. (2017). *Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Najiyati. S, Asmana & Suryadiputra. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
- Samsuddin. M, Kusuma & Djaya. (2014). *Faktor-faktor Yang Berpengaruh terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur*. Samarinda: Jurnal Administrative Reform.
- Soetomo. (2007). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tangkilisan. S. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Theresia, A. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian :

“Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

A. Kepala Desa/ Aparatur Desa

1. Bagaimana Kondisi Perekonomian Masyarakat di Desa ini? (pekerjaan/mata pencahariannya, pendapatan)
2. Selama ini untuk kegiatan apa saja penggunaan Dana Desa?
3. Apakah program-program yang telah dibuat memakai Dana Desa dalam DI bidang pemberdayaan masyarakat? (BUMDes, ekonomi kreatif, dll)
4. Apakah sering dilakukan sosialisasi yang mampu mendorong masyarakat untuk diberdayakan?
5. Sejauh ini apakah Dana Desa mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Desa ini?
6. Langkah apa saja yang harus dilakukan kedepan dalam hal memberdayakan masyarakat?
7. Apa saja hambatan-hambatan dalam menjalankan program-program yang menunjang ekonomi masyarakat Desa ini?
8. Bagaimana respon Masyarakat Desa dalam penyaluran Dana Desa selama ini?
9. Bagaimana harapan bapak ke depan terhadap desa ini?

B. Masyarakat Desa

1. Apakah bapak/ibu mengetahui atau pernah mendengar Dana Desa?
2. Apakah bapak/ibu tau untuk kegiatan apa saja digunakan Dana Desa selama ini?
3. Apakah ada program-program yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat?
4. Bagaimana keterlibatan bapak/ibu dalam merealisasi program tersebut?

5. Apakah menurut bapak/ibu program-program selama ini perlu untuk dilanjutkan?
6. Bagaimana pandangan bapak/ibu kedepan? Apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dan juga masyarakat desa dalam menunjang ekonomi masyarakat?
7. Bagaimana transparansi anggaran oleh aparatur desa selama ini? (sistem pengelolaan dan penyaluran)

Lampiran 3: Dokumentasi Foto



Bersama Keuchik Alue Naga



Kegiatan menenun di Lamgugob



Saat wawancara dengan Sekdes Rukoh



Bersama aparaturnya desa Ie Masen Kayee Adang



Saat mewawancarai Keuchik Desa Perada



Saat mewawancarai sekdes Tibang



Bersama sekdes Kopelma Darussalam



Saat mewawancarai aparatur desa Deyah Raya



Bersama salah satu pengrajin tenun di Lamgugob



Saat mewawancarai sekdes Lamgugob



Bersama Keuchik Ie Masen kayee Adang



Wawancara dengan sekdes Jeulingke



Contoh Pagu Anggaran tahun sebelumnya (realisasi) dan tahun berjalan di Lamgugob



PAUD Al Munawarah di Ie Masen Kayee Adang



tanaman hidroponik salah satu warga desa lamgugob



Bersama sekdess Gampong Pineung



Hidroponik warga desa lainnya



Unit usaha yang ada di Kopelma Darussalam